

Analisis Biaya Satuan Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021

Widiasih KS¹, Sandi Pratama², Ujang Cepi Berlian³

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara, Bandung ^{1,2,3}

*E-mail: widiaks72@gmail.com

Abstract

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari sumber daya manusianya. Bangsa yang cerdas akan menggunakan sumber dayanya secara efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62 tentang Biaya Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan bab IX Standar Pembiayaan Pasal 32 Pendidikan di atas merupakan dasar pengembangan pendidikan nasional. Peningkatan mutu merupakan salah satu pilar pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Satuan biaya pendidikan per siswa menggambarkan secara rinci beban siswa selama menempuh pendidikan di sekolah. Satuan beban setiap siswa akan dicocokkan dengan subsidi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sehingga dapat diketahui besarnya beban yang harus ditanggung oleh siswa. Satuan biaya pendidikan per siswa akan menjadi dasar pertanggungjawaban keuangan sekolah kepada masyarakat dan dasar pengambilan keputusan. Dengan perhitungan yang detail dan transparan akan memberikan informasi biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah untuk dapat memberikan layanan pendidikan dan besarnya dana tambahan dari masyarakat untuk menutup biaya jika pendapatan sekolah dari pemerintah dan bantuan lainnya tidak mencukupi. memadai sehingga mudah mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan sekolah. SMK SAIS 1 Kab. Bandung merupakan salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Bandung. Ada dua program keahlian di SMK SAIS 1 Kab. Bandung yaitu Health and Marketing Analyst. Di SMK SAIS 1 Kab. Bandung belum ada analisis Satuan Biaya Pendidikan. Perhitungan biaya satuan pendidikan diperlukan oleh sekolah dalam menentukan biaya penyelenggaraan pendidikan yang harus ditanggung oleh setiap peserta didik.

Keywords: Analysis, Cost



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Biaya dalam penyelenggaraan pendidikan tidak cukup hanya dengan mengandalkan dana dari satu sumber seperti dari pemerintah pusat saja, atau dari pemerintah daerah saja, tetapi harus diakomodasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Abuddinata, 2003). Keterbatasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk mendukung pembiayaan pendidikan.

SMK SAIS 1 Kab. Bandung merupakan salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Bandung. Ada dua program keahlian di SMK SAIS 1 Kab. Bandung yaitu Analisis Kesehatan dan

Pemasaran. SMK SAIS 1 Kab. Bandung belum ada analisis mengenai Biaya Satuan Pendidikan. Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan diperlukan sekolah dalam menetapkan biaya penyelenggaraan pendidikan yang harus ditanggung oleh masing-masing peserta didik. Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik menggambarkan secara rinci atas beban peserta didik selama mengikuti pendidikan di sekolah. Beban unit setiap peserta didik akan ditandingkan dengan subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sehingga dapat diketahui jumlah beban yang harus ditanggung oleh peserta didik (Amri, 2015). Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik akan menjadi landasan akuntabilitas keuangan sekolah kepada publik dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan (Arwildayanto, Lamatenggo, N, Sumar, 2017). Dengan penghitungan yang detail dan transparan akan memberikan informasi biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan dan besarnya dana tambahan dari masyarakat untuk menutup biaya jika pendapatan sekolah dari pemerintah dan bantuan-bantuan lainnya belum mencukupi sehingga mudah mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pendanaan untuk sekolah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Biaya Satuan Pendidikan di SMK SAIS 1 Kab. Bandung Tahun Ajaran 2020/2021".

Metode

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini untuk menganalisis dan menginterpretasi makna yang terkandung di dalam data hasil dokumentasi dan observasi (pengamatan) yang telah dikumpulkan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memaparkan perhitungan nominal angka Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik per tahun yang meliputi Biaya Operasi dan Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil dari perhitungan Biaya Satuan Pendidikan dan kesesuaian Biaya Operasi Nonpersonalia dengan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Tempat penelitian dilakukan di SMK SAIS 1 Kab. Bandung yang beralamat di Jl. Gading Tutuka 2 Rt. 07 Rw. 11 Ciluncat Kab. Bandung. Waktu penelitian di mulai pada bulan Maret 2021.

Subjek penelitian adalah orang yang dianggap dapat memberikan data mengenai objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah Ketua Tim RKAS, Bendahara, dan Pegawai Tata Usaha. Objek penelitian ini adalah Biaya Satuan Pendidikan yang meliputi Biaya Operasi dan Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan.

1. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu Biaya Satuan Pendidikan per tahun per peserta didik. Biaya Satuan Pendidikan terdiri dari dua komponen yaitu:

a. Biaya Operasi

Biaya Operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Biaya Operasi terdiri dari Biaya Operasi Personalia dan Biaya Operasi Nonpersonalia. Biaya Operasi Personalia antara lain untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Biaya Operasi Nonpersonalia antara lain biaya alat tulis sekolah/bahan dan alat habis pakai, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transport/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan peserta didik/ekstrakurikuler, biaya uji kompetensi, biaya prakerin, biaya pelaporan, dan kebutuhan-kebutuhan operasi lainnya selain gaji dan tunjangan.

Apabila sekolah mendapatkan Bantuan Beasiswa dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan wewenang kepada sekolah untuk mengolahnya sendiri maka Bantuan Beasiswa dapat ditambahkan ke dalam Biaya Operasi. Penghitungan Biaya Operasi per peserta didik dengan cara menjumlahkan semua komponen biaya operasi dibagi dengan jumlah peserta didik.

b. Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan sekolah untuk keperluan pengadaan barang dan jasa selain lahan pendidikan (tanah) yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun untuk penyelenggaraan pendidikan. Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan antara lain biaya untuk pengadaan alat, pengadaan bangunan, dan pengadaan buku. Penghitungan Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan per peserta didik dengan cara menjumlahkan semua komponen Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan dibagi dengan jumlah peserta didik.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen- dokumen yang terkait dengan pembiayaan di sekolah. Studi dokumen dilakukan dilakukan dengan bimbingan pihak sekolah. Dokumen yang dikaji adalah Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), rekapitulasi gaji dan tunjangan PNS, rekapitulasi jumlah peserta didik tahun ajaran 2020/2021, data guru dan karyawan SMK SAIS 1 Kab. Bandung, dan profil sekolah.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi (pengamatan) yaitu dengan cara pengamatan langsung terhadap sarana dan prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang perkantoran, pembangunan dan rehab ruang, serta fasilitas lain yang terdapat di SMK SAIS 1 Kab. Bandung. Guna mempermudah pengamatan dalam penelitian ini menggunakan alat bantu kamera untuk merekam gambar.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dengan menggunakan checklist. Komponen yang akan didokumentasikan meliputi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Berikut checklist (daftar cocok) di SMK SAIS 1 Kab. Bandung:

Tabel 1.
Kisi-kisi Daftar *Checklist*

No	Komponen yang Diamati	Ada Tidak	Jumlah	Keterangan
1	RKAS	V	1	
2	Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan PNS	v	1	
3	Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik	V	1	
4	Data Guru dan Karyawan	V	1	
5	Profil Sekolah	V	1	
6	Ruang Kelas	V	1	
7	Ruang Praktik	V	1	
8	Ruang guru	V	1	
9	Ruang Laboratorium	V	1	
10	Perpustakaan	V	1	
11	Ruang Tata Usaha	V	1	
12	Ruang Konseling	V	1	
13	Ruang UKS	V	1	
14	Ruang Organisasi Kesiswaan	V	1	
15	WC dan Kamar Mandi	V	6	
16	Gudang	V	1	
17	Tempat Beribadah	V	1	
18	Fasilitas Lain	V	2	

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan deskriptif secara kuantitatif dan kualitatif. Data yang bersifat kuantitatif dikumpulkan kemudian melakukan perhitungan Biaya Satuan Pendidikan. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil penelitian dan menyajikan data dalam bentuk dengan tabel dan grafik dengan bantuan program microsoft excel untuk menggambarkan dan memprediksi pembiayaan di sekolah.

a. Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan

(Ferdinand, 2013) menyatakan bahwa satuan biaya permurid dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun yang bersangkutan. Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$Sb (s,t) = f (K(s,t) \text{ dan } M (s,t))$$

Keterangan:

Sb = satuan biaya per murid per tahun

K = jumlah seluruh pengeluaran

M = jumlah murid

s = sekolah tertentu

t = tahun tertentu

(Ferdinand, 2013)

Secara ringkas, perhitungan Biaya Satuan Pendidikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan dokumen RKAS, rekapitulasi gaji dan tunjangan PNS, rekapitulasi jumlah peserta didik tahun ajaran 2020/2021, data guru dan karyawan SMK SAIS 1 Kab. Bandung, dan profil sekolah; (2) Mengklasifikasikan biaya-biaya yang termasuk kelompok Biaya Operasi Personalia dan Biaya Operasi Nonpersonalia. Apabila ada Bantuan Beasiswa yang dikelola sekolah, maka dikelompokkan ke dalam Biaya Operasi; (3) Mengklasifikasikan Biaya-Biaya yang termasuk kelompok Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan; (4) Menghitung Biaya Operasi per peserta didik dengan membagi total Biaya Operasi dengan jumlah peserta didik, $\text{Biaya Operasi} = \frac{\text{Biaya Operasi, Personalia} + \text{Biaya Operasi, Nonpersonalia} + \text{Bantuan Beasiswa}}{\text{Biaya Operasi Per Peserta Didik}} = \frac{\text{Total Biaya Operasi}}{\text{Jumlah Peserta Didik}}$; (5) Menghitung Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan per peserta didik dengan membagi total Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan dengan jumlah peserta didik; (6) $\text{Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan Per Peserta Didik} = \frac{\text{Total Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan}}{\text{Jumlah Peserta Didik}}$; (7) Menghitung Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik dengan membagi total Biaya Satuan Pendidikan (total Biaya Operasi dan total Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan) dengan jumlah seluruh peserta didik. Menentukan sumber-sumber yang mendanai Biaya Satuan Pendidikan (Muljani, 2011).

b. Analisis Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan

Langkah selanjutnya setelah perhitungan Biaya Satuan Pendidikan yaitu mendeskripsikan hasil data yang telah diolah dan membandingkan antara jumlah Biaya Operasi Nonpersonalia di SMK SAIS 1 Kab. Bandung dengan standar Biaya Operasi Nonpersonalia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009. Analisis datanya adalah sebagai berikut: (1) Menentukan standar Biaya Operasi Nonpersonalia Kabupaten Bandung, Standar Biaya Operasi Kabupaten Bandung dilakukan dengan mengalikan Biaya Operasi Nonpersonalia Jawa Barat dengan indeks biaya pendidikan Kabupaten Bandung yaitu sebesar 0.905. Berikut tabel perhitungan standar Biaya Operasi Kabupaten Bandung:

Tabel 2.
Perhitungan Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Kabupaten Bandung

No	Program Keahlian	Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Kab. Bandung (X1)	Indeks Biaya Pendidikan Kab. Bandung (X2)	Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Kab. Bandung (Y = X1 x X2)
1	Analisis Kesehatan	351.360.000	0.905	320.440.320
2	Pemasaran	351.360.000	0.905	320.440.320

(2) Membandingkan jumlah Biaya Operasi Nonpersonalia di SMK SAIS 1 Kab. Bandung dengan standar Biaya Operasi Nonpersonalia Kabupaten Bandung; (3) Menarik kesimpulan yaitu jumlah Biaya Operasi Nonpersonalia di SMK SAIS 1 Kab. Bandung telah sesuai atau tidak dengan standar Biaya Operasi Nonpersonalia Kabupaten Bandung.

Hasil dan Pembahasan

1. Penghitungan Biaya Operasional

Biaya Operasi adalah biaya yang rutin dikeluarkan sekolah untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Biaya Operasi meliputi:

a. Biaya Operasional Personalia

Biaya Operasional Personalia adalah biaya yang rutin dikeluarkan sekolah yang berkaitan dengan kesejahteraan personalia. Untuk melihat alokasi setiap komponen Biaya Operasi Personalia SMK SAIS 1 Kab. Bandung pada Tahun Ajaran 2020/2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.
Persentase Biaya Operasi Personalia SMK SAIS 1 Kab. Bandung Tahun Ajaran 2020/2021

No	Komponen Biaya Non personalia	Total Biaya (Rp)	Persentase
1	Gaji Guru Honorar	30.240.000	4%
2	Gaji Pegawai Honorar	112.200.000	10%
3	Honor Selain Gaji dan Tunjangan	-	0
4	Kesejahteraan Tambahan (Maslahat Tambahan)	-	0
5	Pengembangan SDM	-	0
	Jumlah	142.440.000	100%

Sumber: Dokumen RKAS SMK SAIS 1 Kab. Bandung Tahun Ajaran 2020/2021 yang diolah

Pengalokasian biaya pendidikan di SMK SAIS 1 Kab. Bandung yang paling besar adalah pada komponen personalia. Hal ini karena gaji diberikan rutin tiap bulan dan dalam jumlah yang cukup besar. Dengan pemberian gaji yang cukup diharapkan lebih mengikat para pendidik dan tenaga kependidikan agar tetap profesional pada saat bekerja di sekolah (Baharuddin & Makin, 2010). Berikut Komponen Biaya Operasi Personalia di SMK SAIS 1 Kab. Bandung:

(1) Gaji Guru dan Pegawai honorer

Gaji guru honorer dihitung dengan mengalikan tarif gaji per jam kerja dengan jumlah jam kerja. Dengan demikian, untuk menentukan gaji guru honorer dengan mengumpulkan jumlah jam kerja selama periode tertentu.

Dana yang dialokasikan untuk membiayai gaji guru honorer di SMK SAIS 1 Kab. Bandung sebesar 4% dari komponen Biaya Operasi Personalia. Tarif gaji guru honorer per jam kerja sebesar Rp 20.000,00 sedangkan jumlah seluruh jam kerja guru honorer adalah 126 jam. Dengan demikian, alokasi gaji untuk guru honorer selama tahun Ajaran 2020/2021 yaitu sebesar Rp 30.240.000,00 (Rp 20.000,00 X 126 jam X 12 bulan).

Dana yang dialokasikan untuk membiayai gaji pegawai honorer di SMK SAIS 1 Kab. Bandung sebesar 10% dari komponen Biaya Operasi Personalia. Gaji pegawai honorer ditetapkan oleh sekolah sebesar Rp 935.000,00 untuk tiap orang per bulan. Dengan demikian gaji pegawai honorer selama tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp112.200.000,00 (10 orang X Rp 935.000,00 X 12 bulan) ditambah dengan gaji ke 13 sebesar Rp 9.350.000,00 (10 orang X Rp 935.000,00 X 1 bulan) sehingga total alokasi untuk gaji pegawai honorer selama tahun ajaran 2020/2021 yaitu Rp 121.550.000,00.

(2) Honor yang diperoleh selain gaji dan tunjangan

Honor selain gaji dan tunjangan adalah imbalan yang diterima guru dan karyawan yang melaksanakan diluar tugas pokoknya yang tidak dapat dibayarkan melalui kelompok gaji dan tunjangan (Munir, 2013). Pemberian honor dapat dibayarkan per hari atau per bulan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan.

(3) Kesejahteraan Tambahan (Maslahat Tambahan)

Maslahat tambahan berupa kesejahteraan tambahan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Kesejahteraan tambahan yang diberikan berupa penghargaan guru berprestasi dan berdedikasi istimewa. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan profesionalisme dalam mengajar.

(4) Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia

Biaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menurut definisi termasuk biaya investasi karena penggunaan atau pemanfaatan hasil pengembangan SDM bukan hanya untuk satu tahun, melainkan lebih dari satu tahun (Masditou, 2017). Namun karena biaya pengembangan SDM ada setiap tahun dalam nilai riil yang relatif sama maka biaya pengembangan SDM dapat diklasifikasikan sebagai Biaya Operasi.

Dana yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia di SMK SAIS 1 Kab. Bandung hanya 1% dari komponen Biaya Operasi Personalia. Biaya pengembangan sumber daya manusia menjadi komponen pengalokasian biaya yang paling kecil diantara komponen Biaya Operasi Personalia yang lain.

Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk membekali, memperbaiki, dan mengembangkan kinerja guru dan karyawan guna meningkatkan kemampuan dan produktivitasnya (Widodo, A., & Waridin, Kodoatie, 2011). Pengembangan sumber daya manusia meliputi penyelenggaraan magang di industri, studi banding dan kunjungan industri, pengembangan program MGMP, pelatihan pengembangan guru melalui kegiatan PKG & PKB, program induksi guru junior, workshop kewirausahaan, diklat toolman dan teknisi, diklat petugas sistem informasi dan manajemen, dan diklat petugas keuangan. Pengembangan sumber daya manusia

b. Biaya Operasional Nonpersonalia

Biaya Operasional Nonpersonalia adalah biaya yang rutin dikeluarkan sekolah selain untuk kesejahteraan personalia sekolah. Pengalokasian dana pada setiap komponen Biaya Operasi Nonpersonalia SMK SAIS 1 Kab. Bandung pada Tahun Ajaran 2020/2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

(1) Biaya ATS/BAHP

Alokasi biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah/ bahan dan alat habis pakai pada tahun ajaran 2020/2021 mencapai 6% dari komponen Biaya Operasi Nonpersonalia atau Rp 5.000.000,00. Kebutuhan alat tulis sekolah/bahan dan alat habis pakai yang tercantum dalam dokumen RKAS adalah anggaran untuk keperluan masing-masing kegiatan. Secara umum alat tulis sekolah/bahan dan alat habis pakai di SMK SAIS 1 Kab. Bandung meliputi pengadaan alat tulis baik untuk kantor maupun untuk pembelajaran, fotokopi/penggandaan, penyiapan alat dan perangkat untuk suatu kegiatan, pengadaan alat penunjang dan media pembelajaran seperti papan tulis, pengadaan dokumen belajar, pengadaan perlengkapan uks dan obat-obatan, pengadaan peralatan kebersihan, dan perlengkapan olahraga.

(2) Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan

Alokasi dana untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan sebesar 8% dari komponen Biaya Operasi Nonpersonalia atau Rp 7.000.000,00. Biaya pemeliharaan/ perbaikan ringan meliputi pemeliharaan dan perbaikan ringan peralatan, pemeliharaan dan perbaikan ringan ruang dan taman, serta pemeliharaan dan perbaikan ringan meubelair.

Pemeliharaan peralatan ditentukan oleh jumlah dan umur peralatan yang ada. Pemeliharaan peralatan berupa perawatan rutin agar peralatan selalu siap digunakan sesuai dengan fungsinya dan untuk menambah umur pemakaian peralatan (Herwin, 2012). Pemeliharaan peralatan dilakukan tiap bulan. Peralatan yang dimaksud meliputi peralatan internet sekolah, alat praktik penunjang kegiatan pembelajaran (komputer, laptop, printer, mesin pos, dsb), alat/bahan/media pembelajaran (lcd proyektor, OHP, tape recorder, dsb), peralatan kantor (komputer, printer, risograph, kalkulator, dsb) dan outsourcing pemeliharaan peralatan kantor.

Pemeliharaan dan perbaikan ruang dan taman meliputi penataan ruang baca di perpustakaan, ruang pengolahan buku, pemeliharaan gedung, dan penghijauan (penanaman pohon pelindung dan penataan taman). Pemeliharaan ruang dan gedung untuk menambah nilai umur dan manfaat dari ruang dan gedung, sehingga tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat (Dude, 2011). Dengan pemeliharaan ini kondisi ruang dan bangunan akan terjaga penampilannya. Untuk komponen di dalam ruangan meliputi perbaikan instalasi listrik dan pembelian komponen instalasi listrik setiap tahun dianggarkan terutama untuk pembelian kabel karena setiap tahun ada penggantian kabel yang mengalami konsleting/ kerusakan. Selain itu juga ada penghijauan berupa penanaman pohon dan penataan taman yang dimaksud untuk menjadikan lingkungan menjadi asri dan tidak panas.

Pemeliharaan dan perbaikan ringan meubelair meliputi pemeliharaan perabot kantor seperti meja, kusi dan almari, serta pembenahan administrasi dan papan data sekolah. Papan data sekolah seperti data jumlah peserta didik yang tiap tahunnya mengalami perubahan jumlahnya.

(3) Biaya Daya dan Jasa

Alokasi dana untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan sebesar 10% dari komponen Biaya Operasi Nonpersonalia atau sebesar Rp 9.000.000,00. Biaya jasa internet meliputi biaya akses bandwite sebesar Rp 300.000,00 per bulan. Untuk pemakaian daya listrik dan telepon sekolah mengalokasikan biaya sebesar Rp 400.000,00 per bulan untuk semua kegiatan di SMK SAIS 1 Kab. Bandung.

(4) Biaya Transport/Perjalanan Dinas

Alokasi dana untuk biaya transport/perjalanan dinas sebesar 2% dari komponen Biaya Operasi Nonpersonalia atau sebesar Rp1.000.000,00. Biaya transport/perjalanan dinas diberikan kepada guru, karyawan, atau pihak lain yang mengharuskan menggunakan kendaraan untuk menuju ke tempat kegiatan. Biaya transportasi yang dihimpun meliputi: (a) Transportasi personalia sekolah (pendidik dan tenaga kependidikan) Transport untuk pendidik dan tenaga kependidikan meliputi transport pengesahan kurikulum 2013, transport pengawasan dan pembinaan oleh pengawas sekolah, transport pengawasan dan pembinaan oleh pengawas

sekolah, transport kehadiran PTT dan GTT, transport diklat/workshop/bintek/seminar khusus ke luar kota, transport diklat/ workshop/ bintek/ seminar/ MGMP, dll lokal Klaten, serta transport koordinasi dan konsolidasi lokal kepala sekolah; (b) Transportasi luar personalia sekolah, Transportasi luar personalia sekolah meliputi transport narasumber workshop implementasi kurikulum 2013 dan transport pengawasan dari jajaran Dinas Pendidikan, Pemkab Klaten dan Tim independen.

(5) Biaya Konsumsi

Biaya konsumsi meliputi biaya penyediaan minum guru dan karyawan serta konsumsi workshop dan lunsum. Penyelenggaraan rapat-rapat juga membutuhkan konsumsi akan tetapi biaya yang dianggarkan dalam RKAS tidak dirinci seberapa proporsi biaya untuk konsumsi tetapi langsung untuk semua biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat (Takarina, 2012). Oleh karena itu pada penelitian ini mengelompokkan komponen ke dalam biaya konsumsi adalah biaya-biaya yang dapat ditelusuri besaran yang hanya untuk pengadaan konsumsinya.

Alokasi dana untuk konsumsi sebesar 4% dari komponen Biaya Operasi Nonpersonalia atau sebesar Rp3.000.000,00. Biaya penyediaan minum untuk guru dan karyawan Rp100.000,00 per bulan, jika diakumulasikan dalam setahun biaya konsumsi sebesar Rp1.200.000,00. Biaya konsumsi penyelenggaraan workshop sebesar Rp1.200.000,00.

(6) Biaya Pembinaan Peserta Didik/ Ekstrakurikuler

Alokasi dana untuk pembinaan peserta didik/ ekstrakurikuler sebesar 3% dari komponen Biaya Operasi Nonpersonalia atau sebesar Rp 1.500.000,00. Biaya pembinaan peserta didik/ekstrakurikuler digunakan untuk melakukan pembinaan kepada peserta didik dan membiayai kegiatan ekstrakurikuler.

Komponen yang dibiaya meliputi lomba ketrampilan siswa (LKS), kegiatan tutorial mata pelajaran yang di UN-kan, peningkatan kualitas hasil uji kompetensi melalui diklat kompetensi kejuruan, peringatan hari besar agama, menyelenggarakan lomba atau mengikuti lomba seni dan budaya, Masa Orientasi Siswa (MOS), Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), perkemahan penegak tamu (Perpenta), rapat - rapat OSIS, patroli keamanan sekolah dan paskibraka, peningkatan sikap kompetitif melalui kegiatan olimpiade sais, seni dan olahraga, peringatan hari besar nasional untuk penanaman dan peningkatan jiwa patriotisme, demokrasi, peduli lingkungan melalui kegiatan K7, iuran rutin dan pengelolaan STP2K, kegiatan ekstrakurikuler, pemberian reward bagi siswa berprestasi, kegiatan promosi sekolah dalam rangka menjaring siswa berprestasi, serta promosi dan partisipasi kegiatan dalam rangka penawaran tamatan (Suhardan, D. Riduwan, 2012).

(7) Biaya Uji Kompetensi

Biaya uji kompetensi yaitu biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan ujian. Dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan uji kompetensi sebesar 25% dari Biaya Operasi Nonpersonalia atau Rp 20.000.000,00. Biaya tersebut meliputi penilaian akhir kompetensi dasar, penilaian tengah semester gasal, penilaian tengah semester genap, penilaian akhir semester gasal, penilaian akhir semester genap, ujian nasional, ujian sekolah, pengadaan bahan dan soal uji kompetensi, serta pengadaan jobsheet.

Untuk biaya penilaian akhir kompetensi dasar, penilaian tengah semester gasal, penilaian tengah semester genap, dan penilaian akhir semester gasal dianggarkan untuk 120 peserta didik (kelas X, XI, XII) dengan 15 mata pelajaran.

Untuk penilaian akhir semester genap dianggarkan untuk 120 peserta didik (kelas X dan XI) dengan 15 mata pelajaran (Agustina, 2013). Untuk ujian nasional dan ujian sekolah dianggarkan 47 peserta didik (kelas XII) dengan 15 mata pelajaran.

Pengadaan bahan dan soal uji kompetensi dianggarkan untuk 47 peserta didik (kelas XII) dengan 1 mata pelajaran sesuai program keahlian masing-masing.

(8) Biaya Praktek Kerja Industri (Prakerin)

Biaya prakerin adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan praktek kerja industri (prakerin) untuk peserta didik kelas XI. Dana yang dialokasikan untuk prakerin sebesar 20% dari Biaya Operasi Nonpersonalia atau sebesar Rp 15.000.000,00. Biaya Praktek Kerja Industri (Prakerin) meliputi koordinasi POKJA PSG; pembelakalan peserta prakerin; koordinasi majelis sekolah dan institusi pasangan; penjajagan dan penandatanganan MOU dengan institusi pasangan; penerjunan, monitoring dan pencabutan peserta OJT; pembimbingan kegiatan prakerin ektern dan intern; evaluasi dan konsolidasi program PSG (Pendidikan Sistem Ganda).

(9) Biaya Pelaporan

Biaya pelaporan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan sekolah. Dana yang dialokasikan untuk pembuatan laporan sebesar Rp 5.000.000,00 atau 5% dari komponen Biaya Operasi Nonpersonalia. Biaya pelaporan meliputi pelaporan pelaksanaan verifikasi bahan ajar cetak, penyelenggaraan audit internal, penyelenggaraan audit eksternal (audit survilend), penulisan laporan, penyusunan laporan penyelenggaraan, dan penyusunan laporan kegiatan administrasi dan keuangan komite Sekolah.

Pelaporan verifikasi bahan ajar cetak sebelum bahan ajar tersebut digunakan dalam kegiatan pembelajaran membutuhkan dana sebesar Rp 700.000,00. Penyelenggaraan audit internal berupa pemeriksaan laporan keuangan sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah membutuhkan dana sebesar Rp 2.800.000,00. Penulisan laporan perkembangan per kelas membutuhkan dana sebesar Rp 50.000,00 per kelas sehingga total biaya untuk 6 kelas sebesar Rp 300.000,00. Penyusunan laporan kegiatan administrasi dan keuangan komite sekolah membutuhkan dana sebesar Rp100.000 per bulan, sehingga dalam setahun membutuhkan dana sebesar Rp1.200.000,00.

(10) Biaya Lain-Lain

Biaya lain-lain dalam penelitian ini adalah biaya- biaya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam komponen Biaya Operasi Nonpersonalia diatas. Biaya lain-lain terdiri dari biaya rapat, biaya manajemen, dan biaya sosial. Alokasi dana untuk biaya lain-lain sebesar 15% atau Rp 12.000.000,00.

Biaya rapat berupa biaya yang digunakan untuk membiayai segala keperluan untuk penyelenggaraan rapat. Biaya yang dialokasikan untuk penyelenggaraan rapat sebesar Rp 5.000.000,00. Rapat di SMK SAIS 1 Kab. Bandung meliputi rapat koordinasi dan konsolidasi petugas kesiswaan, rapat pembinaan rutin, rapat penilaian akhir kompetensi dasar, rapat penilaian tengah semester gasal, rapat penilaian tengah semester genap, rapat penilaian akhir semester gasal, rapat penilaian akhir semester genap, rapat penilaian akhir pendidikan (ujian sekolah dan ujian nasional), rapat uji kompetensi keahlian, rapat koordinasi dan pembinaan warga sekolah, rapat pleno orang tua siswa dan komite sekolah, dan rapat koordinasi pengurus komite sekolah (Matin, 2012).

Biaya manajemen berupa biaya yang diperlukan untuk pengelolaan sekolah. Biaya manajemen meliputi akreditasi sekolah, penyusunan program kerja pengurus komite sekolah, operasional komite sekolah, kontribusi kebersamaan dalam kegiatan MKKS dan POSKO, partisipasi kegiatan eksternal dan pencitraan (Mulyono, 2010).

Biaya sosial adalah biaya yang diberikan sekolah untuk kegiatan sosial yang meliputi iuran PMI yang disetorkan ke PMI Kabupaten Bandung sebesar Rp 1.000.000,00; dana sosial OSIS dan siswa yang disumbangkan sebesar Rp 2.000.000,00; retribusi lingkungan sebagai iuran lingkungan sebesar Rp 5.00.000,00; sosial kemasyarakatan seperti takziah, dana sumbangan ke masyarakat sekitar lingkungan sekolah,dll sebsar Rp 1.500.000,00.

Penghitungan Biaya Operasi dilakukan berdasarkan Penghitungan Standar Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melalui pendekatan biaya yaitu dengan menghitung biaya yang akan dikeluarkan berdasarkan komponen biaya. Komponen biaya disusun dengan menggabungkan komponen biaya yang sama untuk

semua kegiatan, kemudian merinci kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya tersebut (Fattah, 2002).

Tabel 4.

Persentase Biaya Operasi Nonpersonalia SMK SAIS 1 Kab. Bandung Tahun Ajaran 2020/2021

No	Komponen Biaya Nonpersonalia	Total Biaya (Rp)	Persentase
1	ATS/BAHP	5.000.000	6%
2	Perbaikan dan Pemeliharaan Ringan	7.000.000	8%
3	Daya dan Jasa	9.000.000	10%
4	Transportasi/ Perjalanan Dinas	1.000.000	2%
5	Konsumsi	3.000.000	4%
6	Pembinaan Peserta Didik/ Ekstrakurikuler	1.500.000	3%
7	Uji Kompetensi	20.000.000	25%
8	Praktek Kerja Industri	15.000.000	20%
9	Pelaporan	5.000.000	6%
10	Biaya Lain-Lain	12.000.000	16%
Jumlah Biaya Operasi Nonpersonalia		78.500.000	100%

Sumber: Dokumen RKAS SMK SAIS 1 Kab. Bandung Tahun Ajaran 2020/2021 yang diolah

2. Penghitungan Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan yaitu biaya yang dikeluarkan sekolah untuk keperluan pengadaan barang dan jasa selain lahan pendidikan (tanah) yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun untuk penyelenggaraan pendidikan. Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan meliputi biaya untuk pengadaan peralatan, bangunan, dan pengadaan buku. Berikut persentase komponen Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan di SMK SAIS 1 Kab. Bandung Tahun Ajaran 2020/2021

Tabel 3.

Persentase Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan SMK SAIS 1 Kab. Bandung Tahun Ajaran 2020/2021

No	Komponen Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan	Total Biaya (Rp)	Persentase
1	Pengadaan Alat	54.260.000	35%
2	Bangunan	123.000.000	65%
3	Pengadaan Buku	5.000.000	10%
Jumlah		182.260.000	100%

Sumber: Dokumen RKAS SMK SAIS 1 Kab. Bandung Tahun Ajaran 2020/2021 yang diolah

a. Pengadaan Alat

Alokasi dana untuk pengadaan alat sebesar 35% dari komponen Biaya Investasi atau sebesar Rp 54.260.000,00. Investasi Alat meliputi pengadaan peralatan olahraga dan seni, pengadaan LCD proyektor 1 unit, pengadaan peralatan laboratorium, pengadaan komputer P4 20 unit, pengadaan timbangan harga digi SM-100 2 unit, pengadaan meja counter dan rak perpustakaan 1 unit.

b. Bangunan

Alokasi dana untuk bangunan sebesar 65% dari komponen Biaya Investasi atau sebesar Rp 123.000.000,00. Investasi bangunan meliputi pembangunan gapura, talut perluasan lapangan upacara, pembuatan resapan air limbah, rehab ruang belajar rusak, rehab pagar belakang, dan rehab gudang.

Perbaikan ruang kelas menjadi prioritas utama pengalokasian dana. Hal ini dikarenakan ruang kelas merupakan pendukung utama kegiatan belajar mengajar di sekolah dan pada tahun ajaran 2020/2021 banyak pembangunan dan perbaikan ruang yang membutuhkan dana yang cukup besar. Prioritas ini tidak menunjukkan suatu kondisi yang harus, akan tetapi lebih kepada kondisi nyata yang dihadapi oleh sekolah saat ini.

c. Pengadaan Buku

Alokasi dana untuk pengadaan buku sebesar 10% dari komponen Biaya Investasi atau sebesar Rp 5.000.000,00. Pengadaan buku meliputi pengadaan buku-buku pelajaran untuk mendukung kurikulum 2013, pengadaan buku-buku referensi dan buku guru, pengadaan buku fiksi, dan pengadaan sumber belajar elektronik.

Penghitungan Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan Per Peserta Didik} \\ & = \text{Total Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan} / \text{Jumlah Peserta Didik} \\ & = \text{Rp } 182.260.000,00 / 120 \\ & = \text{Rp } 151.883,33 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan SMK SAIS 1 Kab. Bandung Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp 182.260.000,00 dan Biaya Investasi Per Peserta Didik sebesar Rp 151.883,33.

3. Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan

Biaya Satuan Pendidikan terdiri dari Biaya Operasi dan Biaya Investasi. Biaya Operasi meliputi Biaya Operasi Personalia, Biaya Operasi Nonpersonalia, dan Bantuan Beasiswa. Biaya Investasi meliputi Biaya Investasi Lahan Pendidikan dan Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan. Di SMK SAIS 1 Kab. Bandung pada Tahun Ajaran 2020/2021 tidak ada pembelian tanah/lahan sehingga Biaya Satuan Pendidikan diperoleh dengan menjumlahkan antara Biaya Operasi dan Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan.

Dari hasil penghitungan diperoleh Biaya Satuan Pendidikan sebesar Rp 324.700.000,00 dan Biaya Satuan Pendidikan per Peserta didik Rp 2.857.716,66. Apabila di sekolah ada investasi berupa lahan pendidikan maka Biaya Investasi akan naik dan berimplikasi pada kenaikan Biaya Satuan Pendidikan.

4. Sumber Pendanaan

Sumber dana di SMK SAIS 1 Kab. Bandung Tahun Ajaran 2020/2021 berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar 45%; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (APBD) sebesar 015%; Sumbangan Orang Tua (SOT) sebesar 35%; dan Sumber Lain sebesar 5%. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 183.600.000,00; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (APBD) sebesar Rp 75.600.000,00; Sumbangan Orang Tua (SOT) sebesar Rp144.000.000,00.

5. Kesesuaian Biaya Operasi Nonpersonalia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009

Jumlah Biaya Operasi Nonpersonalia untuk program keahlian Analisis Kesehatan dan Pemasaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 untuk Kabupaten Bandung sebesar Rp 640.880.640,00 sedangkan di SMK SAIS 1 Kab. Bandung sebesar Rp 324.700.000,00. Terdapat selisih sebesar Rp 316.180.640,00 dibawah peraturan sehingga Biaya Operasi

Nonpersonalia di SMK SAIS 1 Kab. Bandung belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009. Selisih ini diharapkan SMK SAIS 1 Kab. Bandung pada tahun ajaran berikutnya untuk menambah alokasi dana pada komponen Biaya Operasi Nonpersonalia.

6. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini masih banyak kekurangan akibat berbagai keterbatasan, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Biaya Operasi per peserta didik di SMK SAIS 1 Kab. Bandung Tahun Ajaran 2020/2021 adalah Rp 2.857.716,66; (2) Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan per peserta didik di SMK SAIS 1 Kab. Bandung Tahun Ajaran 2020/2021 adalah Rp 1.830.000,00; (3) Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik di SMK SAIS 1 Kab. Bandung Tahun Ajaran 2020/2021 adalah sebesar Rp 2.705.833,33; (4) Sumber dana di SMK SAIS 1 Kab. Bandung Tahun Ajaran 2020/2021 berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar 45%; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (APBD) sebesar 015%; Sumbangan Orang Tua (SOT) sebesar 35%; dan Sumber Lain sebesar 5%. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 183.600.000,00; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (APBD) sebesar Rp 75.600.000,00; Sumbangan Orang Tua (SOT) sebesar Rp144.000.000,00; (5) Jumlah Biaya Operasi Nonpersonalia untuk program keahlian Analis Kesehatan dan Pemasaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 untuk Kabupaten Bandung sebesar Rp 640.880.640,00 sedangkan di SMK SAIS 1 Kab. Bandung sebesar Rp 324.700.000,00. Terdapat selisih sebesar Rp 316.180.640,00 dibawah peraturan sehingga Biaya Operasi Nonpersonalia di SMK SAIS 1 Kab. Bandung belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009. Selisih ini diharapkan SMK SAIS 1 Kab. Bandung pada tahun ajaran berikutnya untuk menambah alokasi dana pada komponen Biaya Operasi Nonpersonalia.

Daftar Rujukan

- Abuddinata. (2003). *Manajemen Pendidikan*. Bogor: Kencana.
- Agustina, R. (2013). *Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan di SMP BOPKRI 3 Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Amri, F. N. (2015). *Tahapan dalam audit atas laporan keuangan*. Jakarta: Raja grafindo.
- Arwildayanto, Lamatenggo, N, Sumar, W. . (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Widya Padjadjaran.
- Baharuddin & Makin. (2010). *Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Dude, S. (2011). Desentralisasi Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Pendidikan pada Lembaga Dasar Islam. *Jurnal Pedagogika*, 2(1), 1–10.
- Fattah, N. (2002). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ferdi, W. (2013). Pembiayaan Pendidikan; Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.
- Herwin, S. . (2012). Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(3), 1–23.
- Masditou. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. *Jurnal*

ANSIRU, 1(2), 126–136.

Matin. (2012). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Muljani, A. & N. (2011). *Dilema Kebijakan Pendanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Nurhadi Center.

Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Munir, A. (2013). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *Jurnal At-Ta' dib*, 8(2), 225–233.

Suhardan, D. Riduwan, & E. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Takarina, S. B. (2012). *Satuan Biaya Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Widodo, A., & Waridin, Kodoatie, J. . (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25–42.